



DINAS
PERIKANAN
KABUPATEN LAMONGAN



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

Lamongan
Megilan

PENDAMPINGAN PENDATAAN PERCEPATAN PENDATAAN KUSUKA DI KABUPATEN LAMONGAN



Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data akurat para pembudidaya sebagai langkah awal pendaftaran KUSUKA. Dengan terdatanya para pelaku usaha, diharapkan program bantuan, pembinaan, dan pengembangan usaha perikanan dapat tersalurkan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.



@diskan.lamongan
@lamongankab



dinasperikananlamongan6760
lamongankabtv

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Laporan manajemen risiko merupakan laporan hasil penilaian risiko di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat 1 yang berbunyi “Bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Dengan disusunnya laporan manajemen risiko tribulan IV, maka dapat dilihat gambaran risiko yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Demikian Laporan Manajemen Risiko Tribulan IV Tahun 2025 disusun, semoga bermanfaat dan memberikan gambaran terkait pengelolaan risiko pada Dinas Perikanan terima kasih.



**Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lamongan**
Yuli Wahyuono, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660727 198903 1 006

BAB.I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen risiko memiliki pengertian suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya untuk menghindari serta meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima.

Manajemen risiko sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas suatu organisasi, manajemen risiko sendiri memiliki sebutan lain yaitu sebuah cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik risiko itu sendiri sudah diketahui ataupun belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko tersebut kepada pihak lain atau meminimalisir efek negatif terjadinya risiko.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Perikanan wajib dan perlu untuk melakukan manajemen risiko guna keberhasilan dalam pencapaian indikator dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala sehingga dapat diketahui risiko yang terjadi serta meminimalisir efek terjadinya risiko.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Deputy Pengawasan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko disusun dengan maksud untuk memberikan informasi terkait risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan langkah-langkah preventif atau kuratif dalam penanggulangan terjadinya risiko pada pelaksanaan program dan

kegiatan organisasi. Sedangkan tujuan penerapan manajemen risiko dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengelola risiko dalam pencapaian sasaran strategis organisasi pemerintah;
2. Meningkatkan peluang organisasi dalam pencapaian target indikator kinerja;
3. Mendorong terciptanya manajemen proaktif, solutif, dan antisipatif;
4. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan organisasi berdasarkan data risiko yang akan terjadi.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam pengelolaan manajemen risiko pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumberdaya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan kegiatan yang akan dilakukan pengelolaan risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan;
- Koordinasi dan Komunikasi.

**BAB.II RENCANA DAN REALISASI
KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO
PERANGKAT DAERAH**

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV TAHUN 2025

Dalam pencapaian indikator kinerja strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang terbagi menjadi 4 indikator kinerja strategis tentunya terdapat risiko strategis yang harus dikelola yaitu :

1. Penurunan produksi perikanan tangkap dikarenakan *Fishing ground* semakin jauh, belum optimalnya penyediaan dan penjaminan sarana prasarana penangkapan ikan;
2. Penurunan produksi perikanan budidaya dikarenakan bencana banjir, hama penyakit ikan, dan penggunaan benih kurang berkualitas;
3. Penurunan indeks harga yang diterima oleh pelaku usaha perikanan akibat biaya produksi tinggi, kurangnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan, dan masih terbatasnya akses wilayah pemasaran produk perikanan Kabupaten Lamongan yang belum memiliki jangkauan pemasaran secara maksimal.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja operasional terdapat beberapa risiko yang sudah diidentifikasi yaitu :

1. Risiko *fraud* dalam alur pelayanan penerimaan PAD tempat pelelangan ikan;
2. Adanya kelompok pelaku usaha perikanan yang tidak dapat mengakses permodalan dan peningkatan manajemen kualitas kelompok;
3. Masih terdapatnya penggunaan alat tangkap yang dilarang dan belum ramah lingkungan;
4. Keterbatasan pagu anggaran;
5. Realisasi program dan kegiatan belum sesuai target yang ditetapkan;
6. Adanya Risiko Kemitraan yang harus dikelola.

Dalam pencapaian kinerja baik itu kinerja strategis maupun operasional, Dinas Perikanan telah menyusun kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada triwulan IV sebagai berikut :

KERTAS KERJA RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025

TRIBUNAN IV

No.	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	<i>Risiko Strategis :</i>					
1	Sosialisasi dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perairan Kabupaten Lamongan dan penangkapan ikan terukut	Berita acara pelaksanaan kegiatan dan penerimaan materi serta peta	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret, Agustus 2025	Maret	
2	Optimalisasi pengawasan sumberdaya perikanan melalui kegiatan patrol rutin dan pendampingan berkerjasama dengan penyuluh perikanan terkait kepatuhan terhadap perizinan	Dokumen hasil berita acara pemeriksaan dan Pelaksanaan Pengawasan	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Maret, Juli, September	Maret, Juli	
3	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Dokumen peta prakiraan cuaca	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret, Juli, September	Maret, Juli	
4	Pembinaan dan Pemantauan Lingkungan Budidaya dan Lab.Kesehatan Ikan Keliling	Uji Sample Kualitas Air dan Kesehatan Ikan dan Hasil Pengujian	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Maret, Juli, September	Maret, Juli	

No.	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
5	Optimalisasi dan peningkatan bantuan sarpras produksi perikanan	okumen proposal penerima Hibah, dan SKT Kelompok	Kepala Dinas Perikanan	Maret, Juli, September	Maret,Juli	
Risiko Operasional :						
1	Penyediaan bantuan berdasarkan dokumen perencanaan usulan masyarakat	Input usulan masyarakat melalui SIPD	Kasubag.Perencanaan dan Evaluasi	Januari	Januari	
2	Pembinaan dan pendampingan administrasi kelompok	Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kelompok	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret, Juli, September	Maret,Juli	
3	Sosialisasi pemahaman terhadap alur SOP pelayanan TPI	Evaluasi kepatuhan penerapan pelayanan SOP Pelayanan TPI	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala UPT.TPI	Maret, Juli, September	Maret,Juli	
4	Optimalisasi diigtal banking melalui layanan QRIS	Crosschek laporan penerimaan PAD dengan karcis retribusi	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala UPT.TPI serta Bank Jatim	Maret, Juli, September	Maret,Juli	
5	Optimalisasi pemberian alat pengganti ramah lingkungan	Proposal Usulan kelompok dan SKT Kelompok	Kepala Dinas Perikanan	Maret, Juli, September	Maret,Juli	

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV TAHUN 2025

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada tribulan IV telah melaksanakan beberapa kegiatan pengendalian yang dijadwalkan terlaksana pada tribulan IV yang dapat dijelaskan melalui kertas kerja sebagaimana berikut :

FORMULIR KERTAS KERJA PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

TRIBUNAL IV

No.	“Risiko” Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	Risiko Strategis :									
1	Fishing Ground Semakin Jauh,Ketaatan terhadap alur penangkapan ikan	RST 01	Maret	Penangkapan ikan berlebihan (Overfishing) dan kerusakan terumbu karang	Biaya Operasional Tinggi		Sosialisasi dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perairan Kabupaten Lamongan dan pemberian bantuan konverter mesin kapal	Maret,Agustus	Maret	-
2	Banjir	RSB 01	Maret	Curah Hujan Tinggi	Gagal Panen/Panen Berkurang		Koordinasi dengan BMKG Juanda	Maret,Juli,September	Maret,Juli	Banjir Wil.Bonoro wo (Turi)
3	Hama Penyakit Ikan,Ketersediaan Sarpras Budidaya	RSB 03	Maret	Kurangnya pengetahuan pengelolaan lingkungan perikanan budidaya	Gagal Panen/Panen Berkurang		Monev dan Lab.Kesehatan Keliling	Maret,Juli,September	Maret,Juli,	Terdapat Serangan HPI di Wil.Glagah dan Karangbina ngun

No.	“Risiko” Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
4	Kurangnya diversifikasi/nilai tambah produk hasil perikanan,Kurangnya akses pemasaran produk perikanan	RSK 01	Maret	Kurangnya Pengetahuan Terhadap Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan	Penurunan angka indeks harga yang diterima		Fasilitasi Pelatihan dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan	Mei	Sudah terlaksana	

C. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hasil hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menjadikan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko belum ada.

D. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring dapat diketahui bahwa pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan pada tribulan IV sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan target rencana pelaksanaan namun perlu adanya penyesuaian metode pengendalian dengan realita pelaksanaan kegiatan terkait .

E. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian terhadap risiko pada tribulan IV sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

**Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lamongan**

Yuli Wahyuono, SH, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19660727 198903 1 006



No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab	
									Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	
											Risiko			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	j	k	
1	Dinas Perikanan	Meningkatkan Produksi Perikanan	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Wilayah Potensi Perikanan Tangkap Yang Dikelola	Perencanaan	Resiko fraud. Mark up harga dalam pengadaan barang dan jasa	Oknum pengadaan melakukan mark up kebutuhan pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi	ROO.25.25.28.01	Kadis Perikanan	Adanya iktikad tidak baik antara pengguna dan penyedia barang jasa untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi/kelompok	
								Pelaporan	Resiko Fraud Manipulasi data penerima bantuan	Oknum dinas menyajikan laporan yang tidak akurat dengan cara menambah atau mengurangi jumlah penerima bantuan		Kadis Perikanan	Lemahnya Pengawasan	
								Pelaksanaan	Resiko Fraud Pemberian Imbalan dalam Pemberian bantuan	Oknum dinas mendapatkan imbalan dari oknum penerima bantuan		Kadis Perikanan	Ketidakpuasan terhadap penghasilan yang diperoleh	
								Pelaksanaan	Resiko Fraud Penyimpangan dalam memberikan bantuan	Oknum dinas kurang memperhatikan tahapan spesifikasi bantuan		Kadis Perikanan	Keterbatasan sumber daya	
								Pelaksanaan	Resiko Fraud Pengadaan bantuan fiktif	Oknum pengadaan mengadakan barang bantuan tidak sesuai kebutuhan		Kadis Perikanan	kurangnya integritas dalam pengadaan barang, adanya peluang/ kesempatan melakukan kecurangan/ gratifikasi	
						% Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Yang Memiliki Standar Operasional		Perencanaan	Risiko Pemangku Kepentingan Terdapat beberapa TPI belum memiliki SOP		ROO.25.25.28.02	Kabid Perikanan Tangkap	Keterbatasan Anggaran Dalam Penyusunan SOP	
								Pelaksanaan	Risiko Fraud Alur penerimaan PAD dalam pelayanan TPI belum optimal	Pelaku Usaha Perikanan Tidak Mengikuti Alur Pelayanan SOP		Kadis Perikanan	Belum terdapatnya SOP dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	
	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Perikanan	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	Pelaksanaan	Resiko Fraud Banyak pembudidaya yang tidak aktif mengikuti pelatihan	Oknum dinas yang kurang melakukan monitoring secara langsung ke pembudidaya ikan	ROO.25.25.28.03	Kabid Perikanan Budidaya	Keterbatasan Anggaran serta Kesadaran pembudidaya yang kurang untuk mengikuti pelatihan	
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan wilayah potensi budidaya yang dikelola	Pendataan	Resiko Fraud Verifikasi Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapatkan bantuan yang tidak sesuai dengan kelompok penerima	Oknum dinas yang kurang memperhatikan kebutuhan kelompok pembudidaya ikan dan Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengajukan bantuan tidak sesuai dengan keahliannya	ROO.25.25.28.04	Kabid Perikanan Budidaya	Belum semua kelompok pembudidaya ikan memahami jenis-jenis bantuan yang dapat diperoleh	
								Pelaksanaan	Resiko Fraud Pengadaan Bantuan yang tidak maksimal	Pembudidaya ikan yang kurang bisa memanfaatkan bantuan yang diperoleh		Kabid Perikanan Budidaya	Belum adanya pengetahuan yang baik dalam melaksanakan budidaya	
								Pelaporan	Resiko Fraud Pelaporan Penggunaan Hibah yang tidak sesuai kenyataan atau tidak mengirimkan laporan	Pembudidaya Ikan yang tidak melaksanakan SOP budidaya dengan benar dan oknum dinas perikanan yang belum maksimal melakukan pendampingan		Kabid Perikanan Budidaya	Pembudidaya Ikan yang merasa takut karena produksi hasil bantuan yang diberikan tidak sesuai	
						Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan	Perencanaan	Risiko fraud adanya masyarakat menggunakan alatangkap terlarang mengambil ikan di wilayah sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.	kurangnya kegiatan sosialisasi ke masyarakat PUD	ROO.25.25.28.05	Kabid Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Belum semua kelompok PUD mengetahui peraturan tentang larangan penggunaan alat tangkap terlarang (Setrum)	

								Pelaksanaan	Risiko Fraud ekosistem ikan di wilayah sungai ,waduk ,rawa terjadi kerusakan akibat penggunaan alat tangkap terlarang	kurangnya personil pengawas perikanan dan anggaran kegiatan		Kabid Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	kurangnya sosialisasi ke masyarakat PUD
								Pelaporan	Risiko Fraud kurangnya pengaduan masyarkat PUD terkait penggunaan alat tangkap terlarang	tidak dapat melaksanakan pendampingan / sosialisasi karena keterbatasan anggaran		Kabid Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	kurangnya komunikasi antara tim lapangan dengan masyarakat PUD
		Meningkatnya produksi ikan yang diolah	Presentase peningkatan produksi ikan yang diolah	Meningkatnya produksi ikan yang diolah	Presentase peningkatan produksi ikan yang diolah	Pembinaan terhadap penerapan persyaratan Perizinan Berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Jumlah iunit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Perencanaan	Risiko fraud tidak berbasis pada kebutuhan riil	Tidak ada koordinasi dengan pihak terkait	ROO.25.25.28.06	Kadis Perikanan	Kurangnya komunikasi antara pihak Dinas dengan tim lapangan
								Pelaksanaan	Risiko fraud manipulasi data	Pendamping lalai melakukan tugas dan tanggungjawab		Kadis Perikanan	Belum ada alat untuk memonitoring tim pendamping
								Pelaporan	Risiko fraud pelaporan fiktif	Laporan tidak sesuai dengan realita		Kadis Perikanan	Tidak adanya format khusus dalam penyusunan laporan

Risiko fraud

Sumber	C/UC	Dampak		Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pendukung Pelaksanaan RTP
		Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko							
I	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x	y	Z
Internal/eksternal	C	Pengaduan masyarakat, kerugian keuangan negara	Masyarakat/ Kelompok penerima bantuan	3	2	6		-	-	Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Dinas Perikanan	Januari-Desember	Belum realisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1vCwDhr6lnyfg4xQq4UV9KybIS3PFfMdD?usp=drive_link
Internal/eksternal	C	Pengaduan masyarakat, kerugian dana bantuan, penurunan mutu bantuan yang merugikan masyarakat	Masyarakat/ Kelompok penerima bantuan	3	3	9	Sudah dilaksanakan verifikasi kelompok penerima bantuan	Dokumen palsu, kesenjangan pengawasan dan audit	Audit rutin membuka laporan pengaduan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Dinas Perikanan	Januari-Desember	Belum realisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1vCwDhr6lnyfg4xQq4UV9KybIS3PFfMdD?usp=drive_link
Internal/eksternal	C	Stigma buruk dimasyarakat kepada orang dinas	Masyarakat/ Kelompok penerima bantuan	2	1	2		-	-	Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Dinas Perikanan	Januari-Desember	Belum realisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1vCwDhr6lnyfg4xQq4UV9KybIS3PFfMdD?usp=drive_link
Internal/eksternal	C	Pengaduan dari masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Perikanan terkait masalah etika dalam pemberian bantuan	Masyarakat/ Kelompok penerima bantuan	3	4	12		Kurangnya akuntabilitas dalam memberikan bantuan dan minimnya pemahaman penerima bantuan terhadap spesifikasi barang sehingga dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan	Peningkatan kualitas SDM, prnguatan sistem pengawasan internal, pengembangan pengaduan yang efektif	Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Dinas Perikanan	Januari-Desember	Belum realisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1vCwDhr6lnyfg4xQq4UV9KybIS3PFfMdD?usp=drive_link
Internal/eksternal	C	Pengaduan masyarakat, menimbulkan kerugian pada penerima bantuan karena barang tidak memadai	Masyarakat/ Kelompok penerima bantuan	2	3	6		-	-	Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Dinas Perikanan	Januari-Desember	Belum realisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1vCwDhr6lnyfg4xQq4UV9KybIS3PFfMdD?usp=drive_link
Internal	C	Alur Pelayanan Pelelangan Ikan Untuk Nelayan kurang optimal	Nelayan	3	4	12					Januari-Desember		
Internal	C	Penurunan PAD sektor pengelolaan TPI	Pemerintah Kab. Lamongan	3	3	9			Dalam proses pembuatan draft SOP PAD		Januari-Desember		
Internal	C	Pembudidaya ikan yang dapat meningkatkan pengetahuan hanya sedikit	Dinas Perikanan dan Pembudidaya	3	3	9	Sudah dilaksanakan program pelatihan budidaya	Waktu sosialisasi di pagi hari yang bersamaan dengan waktu pembudidaya ke sawah tambak, sehingga pembudidaya ikan yang lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan mengikuti pelatihan	Dilaksanakan promosi mengenai pentingnya mengikuti pelatihan budidaya ikan dan mempertimbangkan waktu pelaksanaan sosialisasi di siang hari.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Kepala Dinas Perikanan	Februari-November	Realisasi	
Eksternal	C	Pengaduan pembudidaya ikan kepada pihak Desa atau Dinas Perikanan	Dinas Perikanan dan Pembudidaya	3	3	9	Dilaksanakannya survey dan verifikasi ke calon penerima hibah	Pembudidaya ikan yang kurang jujur dalam menjalankan proses verifikasi	Melakukan klarifikasi ke masyarakat sekitar, penyuluh, atau perangkat desa untuk mengetahui keahlian budidaya dari calon penerima hibah	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Kepala Dinas Perikanan	Januari-Februari, Agustus-September	Realisasi	https://drive.google.com/file/d/1_JMK4NpF_0raNcSCceEg5kDetAW-a8m/view?usp=drive_link
Eksternal	C	Nilai produksi yang menurun dan tidak maksimal	Dinas Perikanan dan Pembudidaya	3	3	9		Pembudidaya yang kurang menerapkan cara budidaya yang baik serta Dinas Perikanan yang belum mengupdate SOP Cara Budidaya yang baik	Memberikan sosialisasi ataupun SOP mengenai cara budidaya yang baik kepada calon penerima hibah	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Kepala Dinas Perikanan	Maret-Oktober	Belum Terealisasi	
Eksternal	C	Nilai Produksi yang nihil dan mengecewakan	Dinas Perikanan dan Pembudidaya	3	3	9		Terbatasnya waktu dalam melakukan pendampingan dan pengawasan	Melakukan koordinasi yang baik dengan penyuluh, dan perangkat desa mengenai kewajiban pelaporan hasil budidaya kepada dinas perikanan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Kepala Dinas Perikanan	Oktober-Desember	Belum Terealisasi	
Eksternal	C	Dapat merusak ekosistem ikan di wilayah sungai , waduk, rawa dan genangan air lainnya	Dinas Perikanan, Masyarakat PUD				sudah dilaksanakan sosialisasi dan pemasangan papan himbauan	kurangnya movev dan sosialisasi	melaksanakan movev dan sosialisasi	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan SDP	Januari-Desember		https://drive.google.com/drive/folders/1eGd29I7QLv49I8oJLzEptXxIIlI4tVQn1

eksternal	c	Kurangnya pengetahuan kelompok Masyarakat PUD terhadap akibat penggunaan alat tangkap terlarang	Dinas Perikanan, Masyarakat PUD						monitoring dan evaluasi secara berkala	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan SDP	Januari-Desember		https://drive.google.com/drive/folders/1eGd29I7QLv49I8pJLzEptXxIIlB4tVQn1
eksternal	C	terjadi kerusakan ekosistem ikan	Dinas Perikanan, Masyarakat PUD						pendampingan tim lapangan agar lebih aktif	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan SDP	Januari-Desember		https://drive.google.com/drive/folders/1eGd29I7QLv49I8pJLzEptXxIIlB4tVQn1
Internal/Eksternal	C	Kegiatan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lain yang sedang berlangsung, Kesalahpahaman dan konflik antar instansi, mitra, atau pemangku kepentingan	Dinas Perikanan, Pemerintah Daerah, Masyarakat	2	2	4			Menjadwalkan pertemuan rutin	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kepala Dinas Perikanan	Januari-Desember		
Internal	C	Kualitas pelaksanaan kegiatan menurun, karena tidak ada kontrol dan bimbingan yang memadai, Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap program maupun lembaga pelaksana	Dinas Perikanan, Pemerintah Daerah, Masyarakat	3	3	9			Sistem pelaporan harian/mingguan dan Supervisi berkala	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kepala Dinas Perikanan	Januari-Desember		
Internal	C	Citra buruk lembaga atau organisasi, karena dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel, Pengambilan keputusan menjadi tidak tepat karena berdasarkan data yang tidak akurat	Dinas Perikanan, Pemerintah Daerah, Masyarakat	2	1	2			Standarisasi Format Laporan gunakan Sistem Digital serta Evaluasi dan feedback	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kepala Dinas Perikanan	Januari-Desember		